

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Kepulauan terbesar yang memiliki populasi menginjak sekitar 270 juta jiwa. Negara ini merupakan sebuah Negara berkembang yang masih pada proses Pembangunan. Indikator untuk mengetahui hasil suatu pembangunan memberikan pengaruhnya yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks pembangunan manusia adalah suatu pedoman guna memandang efek dari performa pembangunan wilayah yang menampilkan kualitas harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup penduduk di suatu wilayah karena memiliki jangkauan yang luas. Namun dalam proses pembangunan, terdapat beberapa masalah yang muncul, salah satunya adalah masalah kemiskinan.

Kemisikinan menjadi salah satu masalah utama yang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Tingkat kemiskinan suatu negara dilihat dari pendapatan dan kebutuhan pokoknya. Oleh karena itu tingkat kemiskinan antar Negara berbeda-beda. Kemiskinan merupakan suatu kondisi di seseorang maupun sekelompok orang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar kehidupannya, baik pakaian, makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Keadaan dimana masyarakat tidak dapat memenuhi hak dasar mereka dan meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Kemiskinan memberi batasan kepada masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang terjamin, dan pekerjaan yang memadai.

Mayarakat yang mengalami masalah kemiskinan ini beradapa pada lapisan menengah kebawah. Mereka tidak bisa mendapatkan pendidikan yang tinggi karena semakin tinggi jenjang pendidikan semakin tinggi pula biaya yang diperlukan. Biaya yang mahal men yebabkan banyak keluarga miskin yang memilih untuk tidak menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, hanya sampai pada tingkat SD maupun SMP saja. Tidak sampai jenjang SMA maupun perkuliahan.

Banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk membantu keluarga miskin untuk mendapatkan pendidikan dengan jenjang yang lebih tinggi seperti

Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) serta beasiswa. Namun kebijakan tersebut masih belum optimal bagi keluarga miskin. Upaya lain dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan adanya kebijakan Program Keluarga Harapan yang dikeluarkan pemerintah melalui Kementerian Sosial. Kebijakan ini disusun guna membantu penduduk miskin yang berada pada kluster pertama. Bantuan yang diberikan berupa bantuan tunai dengan persyaratan tertentu. Kebijakan ini merupakan usaha pemerintah untuk membentuk perlindungan sosial bagi masyarakat miskin guna menaikkan kesejahteraan sosial serta usaha memutus rantai kemiskinan. Program Keluarga Harapan dilaksanakan sebagai pelaksanaan dari:

1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 19. Berbunyi “penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok, aatau masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan”.²
2. Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Pasal 13 berbunyi “Fakir miskin berhak memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan. Memperoleh pelayanan kesehatan dan memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya”. Selain itu pada pasal 15 dan 16 yang berbunyi menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyediakan layanan kesehatan dan memberikan bantuan biaya pendidikan.³
3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Pasal 12 ayat 2-4 yang berbunyi “Pemberian bantuan langsung berkelanjutan diberikan dalam bentuk pemberian uang tunai atau pelayanan dalam panti sosial. Pemberian bantuan langsung berkelanjutan di laksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Negara. Ketentuan yang

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial*, Bab IV, pasal 19.

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin*, Bab II, pasal 13.

lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara serta jumlah pemberian uang tunai di atur dalam peraturan presiden”.⁴

Program Keluarga Harapan merupakan kebijakan berupa pemberian bantuan uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin di dasarkan pada syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan dengan melaksanakan kewajiban. Kebijakan ini di arahkan pada keluarga miskin yang memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial.⁵ Kebijakan ini terdiri dari berbagai komponen, dimulai dari kesehatan, pendidikan, sampai dengan komponen kesejahteraan sosial.

Program Keluarga Harapan pada komponen kesehatan memberikan bantuan kepada ibu hamil, nifas maupun menyusui serta anak usia dini yang belum sekolah. Pada komponen kesejahteraan sosial kebijakan ini memberikan bantuan kepada lanjut usia dan penyandang disabilitas berat. Pada komponen pendidikan memberikan bantuan untuk menempuh wajib belajar 12 tahun sampai dengan SMA sederajat. Bantuan tersebut memberikan kesempatan bagi anak-anak mendapatkan layanan pendidikan yang lebih tinggi dengan mudah. Kebijakan ini dapat meringankan keluarga miskin dalam membiayai pendidikan anak-anaknya.

Berdasarkan data kependudukan Desa Gembongan Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, berikut adalah tingkat pendidikan masyarakat di Desa Gembongan.

⁴ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*, Bab II, pasal 12.

⁵ Lia Muliana, Mursyidin, dan Muhammad Siregar, *Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kesejahteraan Keluarga di Desa Padang Seurahet Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat*, *Jurnal Public Policy*, Vol. 7(2), Mei-Oktober 2021, hal. 92.

Tabel 1.1
Tingkat Pendidikan Masyarakat di Desa Gembongan

No.	Pendidikan	Jumlah	Presentase
1.	Pra Sekolah	3.589	29%
2.	Tidak Tamat SD	1.561	12,6%
3.	SD sederajat	3.632	29,3%
4.	SMP sederajat	2.271	18,3%
5.	SMA sederajat	1.296	10,5%
6.	Perguruan Tinggi Negeri / Akademi	35	0,3%
Jumlah		12.384	100%

Dari tabel 1.1 diatas, kita ketahui bahwa mayoritas masyarakat di Desa Gembongan hanya dapat menyelesaikan jenjang pendidikan pada tingkat SD sederajat dan SMP sederajat. Rendahnya tingkat pendidikan di Desa Gembongan tidak terlepas dari masalah ekonomi masyarakat. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat sebagai petani, pedagang, dan buruh yang berpenghasilan tidak tetap, terlebih lagi terjadinya pandemi Covid-19 yang menyebabkan ekonomi masyarakat menjadi lebih buruk.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui Badan Pusat Statistika, diketahui jumlah masyarakat miskin di Jawa Timur mengalami kenaikan. Salah satu penyebab hak tersebut terjadi dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia pada awal 2020. Pandemi menyebabkan adanya pembatasan sosial di berbagai wilayah, yang mana kebijakan tersebut berdampak pada kegiatan produksi, distribusi, dan operasional lainnya. Dimana kinerja perekonomian terganggu, penghasilan masyarakat mengalami penurunan karena sebagian besar sektor usaha mengurangi aktivitas perekonomian. Dampak jangka panjang yang ditimbulkan adalah meningkatnya pengangguran yang pada akhirnya mengakibatkan jumlah masyarakat miskin pun meningkat. Diketahui jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Blitar dari tahun 2019-2021 mengalami kenaikan dari 103,75 ribu jiwa (8,94%) menjadi 112,62 ribu jiwa (9,65%).

Kondisi tersebut berdampak pada terabaikannya pendidikan anak sehingga hanya sampai pada tingkat SD sederajat saja. Rendahnya pendidikan masyarakat yang berarti rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di Desa

Gembongan. Hal tersebut berdampak pada rendahnya kualitas hidup masyarakat. Kebijakan Program Keluarga Harapan ada untuk merespon permasalahan tersebut dalam jangka panjang. Melalui komponen pendidikan diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah anak-anak dari keluarga miskin terutama untuk mendapatkan pendidikan wajib 12 tahun.

Kebijakan ini dilakukan di Desa Gembongan untuk memberikan kesempatan kepada anak dari keluarga miskin meningkatkan kualitas hidup dan sumber daya manusia melalui pendidikan. Dengan 225 Penerima Manfaat di Desa Gembongan diharapkan dapat membantu meringankan pengeluaran keluarga miskin dan dalam jangka panjang dapat memutuskan rantai kemiskinan di antara generasi dan dapat memberikan pengaruh pada upaya penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Pendidikan Anak Masyarakat Miskin (Studi Kasus di Desa Gembongan Kecamatan Pongok Kabupaten Blitar)”.

B. Rumusan Masalah

1. Adakah pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan terhadap Pendidikan Anak Masyarakat Miskin di Desa Gembongan Kecamatan Pongok Kabupaten Blitar?.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan terhadap Pendidikan Anak Masyarakat Miskin di Desa Gembongan Kecamatan Pongok Kabupaten Blitar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan kontribusi berupa referensi kajian, bahan bacaan dan dapat menambah wawasan pengetahuan serta bisa menjadi pembanding dengan penelitian lain yang berkaitan dengan Program Keluarga Harapan.

2. Manfaat Praktis

- a. Kepala Dinas Sosial: Penelitian ini bisa memberikan pendapat positif bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan yang menyangkut peningkatan peran stakeholder yang berkaitan dengan Program Keluarga Harapan.
- b. Pemerintah Desa: Penelitian ini bisa memberikan informasi kepada pemerintah desa mengenai dampak yang ditimbulkan dari Program Keluarga Harapan pada pendidikan penduduk dan memberikan masukan untuk pelaksanaan bantuan sosial lainnya
- c. Penerima Program Keluarga Harapan: Penelitian ini bisa menyampaikan pemahaman pada penerima manfaat mengenai pentingnya bantuan ini pada pendidikan masyarakat.
- d. Peneliti Lain: Penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan pada pembahasan tentang Program Keluarga Harapan dalam komponen pendidikan. Selain itu bisa sebagai informasi pada masyarakat dan bahan referensi bagi peneliti maupun pihak lain.

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dari penelitian ini sebagai berikut:

1. H_0 : Tidak ada pengaruh kebijakan Program Keluarga Harapan terhadap pendidikan anak masyarakat miskin di Desa Gembongan Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.
2. H_1 : Ada pengaruh kebijakan Program Keluarga Harapan terhadap pendidikan anak masyarakat miskin di Desa Gembongan Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

F. Penegasan Istilah

Penegasan istilah ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan dalam hal penafsiran yang digunakan pada penelitian. Diperlukan adanya penegasan istilah “Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Pendidikan Anak Masyarakat Miskin (Studi Kasus di Desa Gembongan Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)” sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual
 - a. Kebijakan

Suatu keputusan tetap serta mempunyai ciri yang tetap serta tingkah laku yang berulang dari yang membuat dan melaksanakan keputusan tersebut disebut sebagai kebijakan. Kebijakan merupakan sebuah perbuatan yang menuju pada maksud yang dirancang oleh individu, kelompok, maupun pemerintah pada lingkungan tertentu berkaitan dengan adanya kendala sekaligus mencari kesempatan untuk menggapai maksud dan menncapai sasaran yang diinginkan. Kebijakan merupakan suatu ketentuan yang bermaksud guna dilakukan oleh pembuat kebijakan ataupun yang mematuhi kebijakan tersebut.⁶

b. Program Keluarga Harapan (PKH)

Bantuan sosial berupa uang tunai yang diberikan pada rumah tangga miskin melalui ketentuan dan syarat yang ditentukan merupakan Program Keluarga Harapan. Dengan bantuan ini keluarga diharapkan mendapatkan hak yang sesuai dalam menggunakan layanan publik pendidikan, kesehatan, maupun makanan dan gizi guna meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Indikator pada program ini adalah pendampingan pendidikan, pendampingan kesehatan, serta pendampingan kesejahteraan sosial.⁷

c. Pendidikan Anak

Usaha memberikan stimulasi atau rangsangan bagi perkembangan potensi anak supaya menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, memiliki akhlak mulia, kritis, cakap, kreatif, inovatif, percaya diri, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab merupakan pendidikan anak.⁸

⁶ Enza Resdiana, *Implementasi Progrma Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Keluarga Sangat Miskin (Studi di UPPKH Kecamatan Sumenep)*, hal. 6.

⁷ Septias Wahyu, Lutfi Ariefianto, dan Irliana Faiqatul, *Hubungan Antara Program Keluarga Harapan (PKH) dengan Keberadaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Demung Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo*, Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, Vol. 6(1), Februari 2022, hal. 47.

⁸ Suyadi, & Maulidiya Ulfah, *Konsep Dasar PAUD*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hal.19.

d. Masyarakat Miskin

Masyarakat miskin merupakan kondisi dimanana masyarakat memiliki kemampuan yang tidak baik . Masyarakat bergantung pada bantuan dari luar yang menyebabkan tidak meningkatnya kualitas hidup dan kondisi perekonomian.⁹

2. Penegaraan Operasional

Secara operasional, yang dimaksud dengan “Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Pendidikan Anak Masyarakat Miskin (Studi Kasus di Desa Gembongan Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar” adalah penelitian ilmiah yang berfokus pada berapa besar pengaruh dari kebijakan Program Keluarga Harapan terhadap Upaya Pendidikan Anak bagi Masyarakat Miskin.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disini untuk mempermudah dalam memahami pembahasan proposal, maka penulis mengemukakan sistematika pembahasan. Adapun sistematika penulisan seminar proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Bab I, Pendahuluan. Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.
2. Bab II, Landasan teori. Terdiri dari teori kebijakan, teori PKH, teori pendidikan anak, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.
3. Bab III, Metode Penelitian. Bab ini berisikan prosedur penelitian yang membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, dan pustaka sementara.
4. Bab IV, Hasil Penelitian. Bab ini berisi hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Data kemudian dianalisis dan dijelaskan lebih detail. Bab ini membahas mengenai judul yang ada, menjawab pertanyaan yang ada dirumusan masalah dan mendeskripsikannya.

⁹ Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Penerbit Humaniora, 2004), hal. 6.

5. Bab V, Pembahasan. Bab ini merupakan bahasan akhir tentang penelitian berbentuk fakta-fakta yang ada di lapangan yang dikaitkan dengan gambaran umum, teori- teori , dan kajian yang ada di bab sebelumnya.
6. Bab IV, Penutup. Merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan dan hasil penelitian serta saran yang bermanfaat bagi penelitian.
7. Daftar Pustaka. Berisi sumber-sumber yang digunakan penelitan.